

**MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAHAN HUTAN
KEMASYARAKATAN DI GAPOKTANHUT PUJO MAKMUR KPH
PESAWARAN**

(Skripsi)

Oleh

**Delsa Bonita Sari Simanullang
2214151088**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAHAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI GAPOKTANHUT PUJO MAKMUR KPH PESAWARAN

Oleh

DELSA BONITA SARI SIMANULLANG

Pengelolaan hutan secara berkelanjutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Gapoktanhut Pujo Makmur menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga keseimbangan ekologi. Modal sosial menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas pengelolaan sumber daya hutan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur modal sosial masyarakat serta mengevaluasi tingkat modal sosial dalam pengelolaan HKm di Gapoktanhut Pujo Makmur, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara menggunakan kuesioner terhadap 67 responden yang dipilih melalui teknik simple random sampling dengan rumus Slovin dari total 205 anggota. Analisis dilakukan berdasarkan enam pilar modal sosial: organisasi dan jaringan, kepercayaan dan solidaritas, aksi kolektif dan kerja sama, informasi dan komunikasi, kohesi sosial dan inklusi, serta pemberdayaan dan aksi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur modal sosial telah terbentuk dengan kekuatan utama pada tingginya tingkat kepercayaan, solidaritas, dan struktur organisasi yang jelas. Namun, masih terdapat kelemahan pada aspek partisipasi aksi kolektif, rendahnya jejaring eksternal, serta pemberdayaan yang belum optimal. Tingkat modal sosial masyarakat berada pada kategori dasar hingga substansial menurut kontinum Uphoff. Modal sosial telah berkembang dari sekadar norma menjadi praktik yang memberikan manfaat nyata bagi anggota, meskipun penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan jaringan eksternal tetap diperlukan untuk keberlanjutan pengelolaan.

Kata Kunci: aksi kolektif dan kerja sama, informasi dan komunikasi, kepercayaan dan solidaritas, kohesi sosial dan inklusi, organisasi dan jaringan

ABSTRACT

COMMUNITY SOCIAL CAPITAL IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT IN GAPOKTANHUT PUJO MAKMUR KPH PESAWARAN

By

DELSA BONITA SARI SIMANULLANG

Sustainable forest management through the Community Forest (HKm) scheme at Gapoktanhut Pujjo Makmur positions the community as the primary actor in improving well-being while maintaining ecological balance. Social capital is a crucial factor in determining the effectiveness of forest resource management. This study aims to identify the elements of community social capital and evaluate the level of social capital in HKm management at Gapoktanhut Pujjo Makmur, Pesawaran Regency, Lampung Province. The research method employed a qualitative descriptive approach, with primary data collected through interviews using a questionnaire administered to 67 respondents selected via simple random sampling using the Slovin formula from a total of 205 members. The analysis was conducted based on the six pillars of social capital: organizations and networks; trust and solidarity; collective action and cooperation; information and communication; social cohesion and inclusion; and empowerment and political action. The results of the study indicate that all elements of social capital have been established, with the primary strengths being high levels of trust, solidarity, and a clear organizational structure. However, there are still weaknesses in collective action participation, limited external networks, and suboptimal empowerment. The community's level of social capital falls within the elementary to substantial category on Uphoff's continuum. Social capital has evolved from mere norms into practices that provide tangible benefits to members. However, institutional capacity building and the expansion of external networks remain necessary for the sustainability of management.

Kata Kunci: collective action and cooperation, information and communication, organizations and networks, social cohesion and inclusion, trust and solidarity

**MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAHAN HUTAN
KEMASYARAKATAN DI GAPOKTANHUT PUJO MAKMUR KPH
PESAWARAN**

Oleh

DELSA BONITA SARI SIMANULLANG

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA KEHUTANAN**

Pada

**Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN DI GAPOKTANHUT
PUJO MAKMUR KPH PESAWARAN**

Nama : **Delsa Bonita Sari Simanullang**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2214151088

Program Studi : Kehutanan

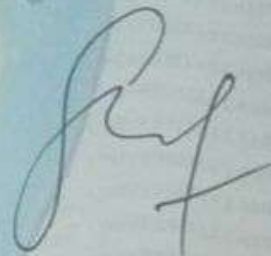
Fakultas : Pertanian

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

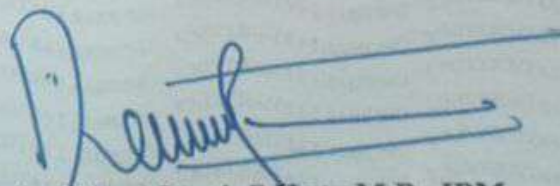


Rommy Ourniati, S.P., M.Si.
NIP. 197609122002122001



Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.
NIP. 196412231994031003

2. Ketua Jurusan Kehutanan



Dr. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P., IPM
NIP. 197310121999032001

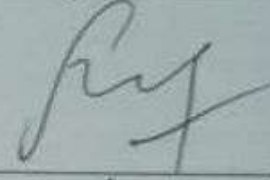
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

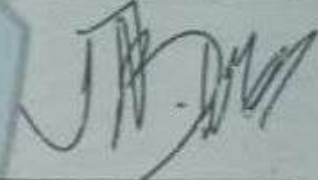
Ketua : Rommy Qurniati, S.P., M.Si.



Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.



Anggota : Prof. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.



2. Dekan Fakultas Pertanian



Dr. Ir. Kusyanta Futas Hidayat, M.P.

NIP. 49641/181989021002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 April 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delsa Bonita Sari Simanullang
NPM : 2214151088
Jurusan : Kehutanan
Alamat : Lumban Tobing, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sungguh-sungguh, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Gapoktanhut Pujo Makmur KPH Pesawaran”

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Selanjutnya, saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada skripsi ini digunakan oleh dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung,
Yang membuat pernyataan



DELSA BONITA SARI SIMANULLANG
NPM 2214151088

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Delsa Bonita Sari Simanullang yang akrab disapa dengan nama Delsa. Lahir pada tanggal 13 November 2004 di Desa Lumban Tobing, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Penulis merupakan anak dari Bapak Sahala Martua Simanullang dan Ibu Delmani Banjarnahor dan merupakan anak keempat dari enam bersaudara. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 173393 Doloksanggul pada tahun (2010-2016), SMP Swasta HKBP Doloksanggul pada tahun (2016-2019), dan SMA N 1 Doloksanggul pada tahun (2019-2022). Pada tahun 2022 penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi Universitas Lampung dengan mengambil program studi Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian. Pada tahun 2025 penulis melaksanakan kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah pada bulan Januari-Februari 2025. Pada tahun yang sama di bulan Juli-Agustus 2025, penulis mengikuti kegiatan Praktik Umum selama 20 hari di Hutan Pendidikan Universitas Gadjah Mada, yaitu di KHDTK Wanagama, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan di KHDTK Getas, Kecamatan Kradenan, Blora, Jawa Tengah. Pada bulan November-Desember 2024, penulis mengikuti praktikum umum yang diselenggarakan Jurusan Kehutanan sebagai enumerator data analisis vegetasi Repong Damar di Gunung Kemala dan Pekon Pahmungan. Penulis juga melakukan publikasi ilmiah berjudul “Aksi Kolektif dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Gabungan Kelompok Tani Hutan Pujo Makmur Kesatuan Pengelolaan Hutan Pesawaran” yang dimuat dalam *Journal of Sustainable Development*.

MOTTO

“Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku”

(Mazmur 118:13)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir kedunia ini,
tidak mungkin aku tidak ada artinya”

“Kepercayaan adalah akar yang meneguhkan, kerja sama adalah batang yang menopang, dan kesejahteraan adalah buah yang memberi kehidupan bagi semua”

(Penulis)

“Tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah, tetap Bertahan”

(Filipi 4:6)

“Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya”

(Yesaya 40:29)

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada Sang Juruslamat Tuhan Yesus Kristus, kepada Ayah, Ibu, Abang, Kakak dan Adik tercinta yang selalu ada, Mendoakan, Mendukung, dan Memotivasi saya selama menuntut ilmu”

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat rahmat dan karunia-Nya. Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi yang berjudul **Modal Sosial Masyarakat untuk Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur KPH Pesawaran**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan menempuh gelar Sarjana Kehutanan di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Penulis menyadari keterbatasan dan menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan pribadi, melainkan karena mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada beberapa pihak sebagai berikut.

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P., IPM. selaku Ketua Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
4. Bapak Trio Santoso, S.Hut, M.Si., selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
5. Ibu Rommy Qurniati, S.P., M.Si., selaku pembimbing pertama saya yang telah memberi ilmu bimbingan dan motivasi, dengan hati yang sabar saat

bimbingan sehingga proses pengerjaan skripsi dapat berjalan dengan baik sampai dengan selesai.

6. Bapak Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S., selaku dosen pembimbing kedua saya yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pendapat dan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
7. Bapak Prof. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si selaku dosen pembahas atau penguji pada skripsi saya. Terima kasih atas masukan dan saran-saran pada seluruh rangkaian proses sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
9. Orang yang selalu saya rindukan dan cinta pertama saya Ayah saya Sahala Martua Simanullang. Beliau adalah ayah yang sangat baik, ayah yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang selalu menyemangati penulis mulai dari awal penulis memutuskan melanjutkan perkuliahan di kota ini, Bandar Lampung, dengan jurusan yang penulis inginkan. Beliau yang selalu mengerti hati penulis, yang selalu senantiasa mendengar segala keluhan penulis. Beliau selalu hadir saat penulis membutuhkan. Hal ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari beliau.
10. Kepada ibu saya Delmani Banjarnahor yang selalu memberikan penulis pelukan hangat, yang selalu memberikan nasihat mulia. Beliau adalah wanita yang paling sabar dan kuat, ibu yang senantiasa mendoakan penulis, yang selalu memperhatikan penulis jika penulis ada masalah. Beliau yang rela membiarkan puterinya pergi merantau di tempat jauh, walaupun banyak tantangan hidup, ibu dengan pasrah dan dengan kelembutan hati memperbolehkan penulis untuk mengapai cita-cita penulis.
11. Abang Lamhot Simanullang dan Osran Simanullang, penulis berterima kasih karena selalu memberi support yang tiada hentinya, baik secara materi maupun nonmateri, yang selalu memberi semangat dan doa. Abang yang selalu ingin penulis mengharumkan nama baik keluarga dan menjadi adik yang dapat diandalkan ke depannya.

12. Kakak saya, Kristiani Rohani Simanullang, yang selalu ada disaat susah senang nya penulis. Beliau teman penulis berbagi cerita pengalaman hidup dan motivasi. Beliau adalah seorang kakak yang hangat yang memberikan cinta tiada tara kepada penulis.
13. Adek saya Minto Simanullang dan Mathias Jorsen Simanullang, yang selalu memberikan penulis senyum canda tawa. Adek yang selalu menyemangati penulis dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang di tahap akhir.
14. Kepada teman seperjuangan saya dulu, Margaret Maibang, yang selalu menemani penulis dari awal PKKMB sampai semester 3, baik susah maupun senang. Beliau orang yang penulis rindukan yang tidak dapat melanjutkan cita-citanya. Penulis berterima kasih kepada beliau karena sudah pernah ada dihidup penulis yang selalu berbagi pelukan hangat dan cinta yang besar.
15. Helena Rosalinda Sihombing, adek saya yang dulunya tidak saya kenal, sekarang menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi adek, teman dan sahabat yang mendengar keluh kesah penulis, yang selalu memberikan semangat dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai akhir.
16. Teman-teman saya yang tak kalah pentingnya: Niko Hutasoit, Dinda Tiara, Sausan Tazkya, Roro Ajeng, Sandra Juliana, Lutfiah Zahra, Anindya Ramadhanty, Inggrid Sianturi, Vicky Puja Wahanawati. Terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan penulis ketika perkuliahan, yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir penulisan.
17. Teman seperbimbingan dan sepenelitian Lutfiah Zahra, Sandra Juliana, Nindya Firza, Bintang Adjie, M. Agil. Terima kasih telah hadir, saling memberikan banyak ilmu berharga, memberikan semangat, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan kebahagiaan selama proses penelitian dan membantu penulis dari awal penelitian selesai hingga akhir penyusunan skripsi.
18. Kepada angkatan 2022 (Rexterion) yang telah saling bekerja sama, memberikan semangat, motivasi dan dukungan dalam hal apa pun selama proses perkuliahan.

19. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Delsa Bonita Sari Simanullang. Terima kasih telah bertahan sampai di titik ini. Terima kasih sudah bertahan sampai dititik ini walaupun banyak hal yang sudah dikorbankan. Terima kasih sudah berjuang sendirian di kota yang tidak ada pelukan hangat, yang selalu menguatkan hati, pikiran sendiri, yang menjalani kehidupan secara mandiri di perantauan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Penulis bangga kepada diri sendiri yang menjadi wanita kuat, wanita mandiri yang melewati segala cobaan. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca serta menjadi landasan untuk pengembangan penelitian yang berkualitas di masa mendatang.

Bandar Lampung, 27 April 2026

DELSA BONITA SARI SIMANULLANG

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kerangka Pemikiran.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Gambaran Lokasi Penelitian	6
2.2. Perhutanan sosial	7
2.3. Hutan Kemasyarakatan	11
2.4. Modal Sosial	13
III. METODE PENELITIAN	18
3.1. Waktu dan Tempat	18
3.2. Alat dan Objek Penelitian	19
3.3. Jenis dan Sumber Data	19
3.3.1. Jenis Data	19
3.3.2. Sumber Data.....	19
3.4. Populasi dan Pengambilan Sampel	20
3.5. Analisis Data	21
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1. Unsur Modal Sosial di Gapoktanhut Pujo Makmur.....	24
4.1.1. Organisasi dan Jaringan	24
4.1.2. Kepercayaan dan Solidaritas	30

4.1.3. Aksi Kolektif dan Kerja Bersama	33
4.1.4. Informasi dan komunikasi.....	37
4.1.5. Kohesi Sosial dan Inklusi.....	40
4.1.6. Pemberdayaan dan aksi politik.....	43
4.2. Tingkat Modal Sosial pada Pengelolaan Agroforestri di Gapoktanhut Pujo Makmur	45
V. KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Responden per KTH	21
2. Unsur-Unsur Modal Sosial.....	22
3. Kontinum Modal Sosial (Uphoff 1999)	23
4. Organisasi dan Jaringan di Gapoktanhut Pujo Makmur	25
5. Kepercayaan dan Solidaritas di Gapoktanhut Pujo Makmur	31
6. Aksi Kolektif dan Kerja sama di Gapoktanhut Pujo Makmur	33
7. Informasi dan Komunikasi di Gapoktanhut Pujo Makmur	37
8. Kohesi Sosial dan Inklusi di Gapoktanhut Pujo Makmur	41
9. Pemberdayaan dan Aksi Politik di Gapoktanhut Pujo Makmur	43
10. Tingkat Modal Sosial Masyarakat Pada Pengelolaan Agroforestri di	46
11. Data Mentah Kuesioner Unsur Organisasi dan Jaringan	78
12. Data Mentah Kuesioner Unsur Kepercayaan dan Solidaritas	89
13. Data Mentah Kuesioner Unsur Aksi Kolektif dan Kerja Sama	93
14. Data Mentah Kuesioner Unsur Informasi dan Komunikasi	96
15. Data Mentah Kuesioner Unsur Kohesi Sosial dan Inklusi	99
16. Data Mentah Kuesioner Unsur Pemberdayaan dan Aksi Kolektif	102
17. Rekapitulasi Unsur Organisasi dan Jaringan	106
18. Rekapitulasi Unsur Kepercayaan dan Solidaritas	109
19. Rekapitulasi Unsur Aksi Kolektif dan Kerja Sama.....	112
20. Rekapitulasi Unsur Informasi dan Komunikasi	114
21. Rekapitulasi Unsur Kohesi Sosial dan Inklusi	115
22. Rekapitulasi Unsur Pemberdayaan dan Aksi Kolektif.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	5
2. Peta Lokasi Penelitian.....	18
3. Dokumentasi Wawancara Anggota Kelompok Tani.....	68
4. Dokumentasi Wawancara Ketua Gapoktanhut Pujo Makmur	68
5. Dokumentasi Wawancara Anggota Kelompok Tani.....	69
6. Lahan di Gapotanhut Pujo Makmur.....	69
7. Lahan di Gapotanhut Pujo Makmur.....	70
8. Foto Bersama Bapak Maryadi Ketua Gapoktanhut Pujo Makmur	70

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan hutan secara berkelanjutan merupakan isu strategis dalam pembangunan lingkungan dan sosial di Indonesia. Salah satu pendekatan yang diakui efektif adalah Perhutanan Sosial, yaitu sistem pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan ekologi, dan memperkuat dinamika sosial budaya (Zulkarnain, 2021). Program Perhutanan Sosial ditetapkan sebagai pendekatan strategis dalam merespons tantangan degradasi lingkungan dan deforestasi, sekaligus berperan signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Puteri dan Puspaningrum, 2024). Program perhutanan sosial mencakup berbagai skema seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Salah satu skema yang berkembang pesat adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm), yang memberikan izin kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan hutan negara secara lestari dengan sistem agroforestri. Melalui skema ini, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga fungsi ekologis hutan. Hutan Kemasyarakatan merupakan bentuk intervensi negara dalam memberdayakan masyarakat lokal melalui pemberian izin kelola hutan dengan prinsip agroforestri (Syalihin *et al.*, 2025).

Keberhasilan pengelolaan HKm tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan kebijakan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dalam masyarakat. Salah satu solusi dari berbagai tantangan dalam pengelolaan HKm adalah memperkuat modal sosial. Modal sosial adalah norma informal yang terwujud dan mendorong kerja sama antarindividu (Fukuyama, 2001). Modal sosial, menurut Putnam (1995), terdiri dari tiga unsur utama, yaitu norma,

kepercayaan, dan jaringan. Pentingnya modal sosial terletak pada kemampuannya dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat komitmen kolektif dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat terbukti dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan efektivitas pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Syafitri *et al.*, 2024). Selain itu, masyarakat dengan modal sosial yang tinggi umumnya memiliki tingkat kepatuhan terhadap aturan yang lebih baik, tingkat kepercayaan yang tinggi, serta jaringan sosial yang kuat sehingga mampu bekerja sama secara efektif (Sabar *et al.*, 2022). Sebaliknya, lemahnya modal sosial dapat memicu konflik, menurunkan partisipasi, serta berpotensi menyebabkan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan (Silooy *et al.*, 2024).

Salah satu contoh implementasi HKM yang menarik untuk dikaji adalah Gapoktanhut Pujo Makmur di kawasan hutan lindung Pematang Kubuato, Register 20, di bawah pengelolaan KPH Pesawaran. Sebelum memperoleh izin resmi pada tahun 2021, kelompok ini telah melakukan penanaman pohon *Multi-Purpose Tree Species* (MPTs) sejak 2008 (Duryat *et al.*, 2024). Selama beberapa generasi, Gapoktanhut Pujo Makmur telah memiliki kesempatan untuk menerapkan dan mempertahankan agroforestri di lahan yang digarap (Rufaidah dan Harianto, 2024). Praktik pengelolaan ini dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No: P.37/MENHUT-II/2007 yang menerapkan sistem agroforestri tanpa menebang pohon kehutanan (Surnayanti *et al.*, 2024). Aktivitas pengelolaan yang dilakukan secara kolektif mengindikasikan adanya peran modal sosial dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan.

Kajian mengenai modal sosial cenderung hanya menyoroti tiga komponen dasar modal sosial. Padahal, pendekatan yang lebih komprehensif telah dikembangkan oleh *World Bank* yang mengidentifikasi enam elemen modal sosial: organisasi dan jaringan, kepercayaan dan solidaritas, aksi kolektif dan kerja sama, informasi dan komunikasi, kohesi dan inklusi sosial, serta pemberdayaan dan aksi politik (Grootaert *et al.*, 2004; Dudwick *et al.*, 2006; Jones dan Woolcock, 2007). Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana modal sosial bekerja dalam suatu kelompok masyarakat.

Penelitian ini juga hadir untuk mengkaji elemen-elemen yang belum banyak disentuh, khususnya pada aksi kolektif dan kerja sama dalam konteks pengelolaan HKm.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana unsur-unsur modal sosial berperan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat modal sosial masyarakat dalam mendukung keberhasilan pengelolaan HKm. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana unsur modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur KPH Pesawaran?
- 2 Seberapa tinggi tingkat modal sosial dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur KPH Pesawaran?

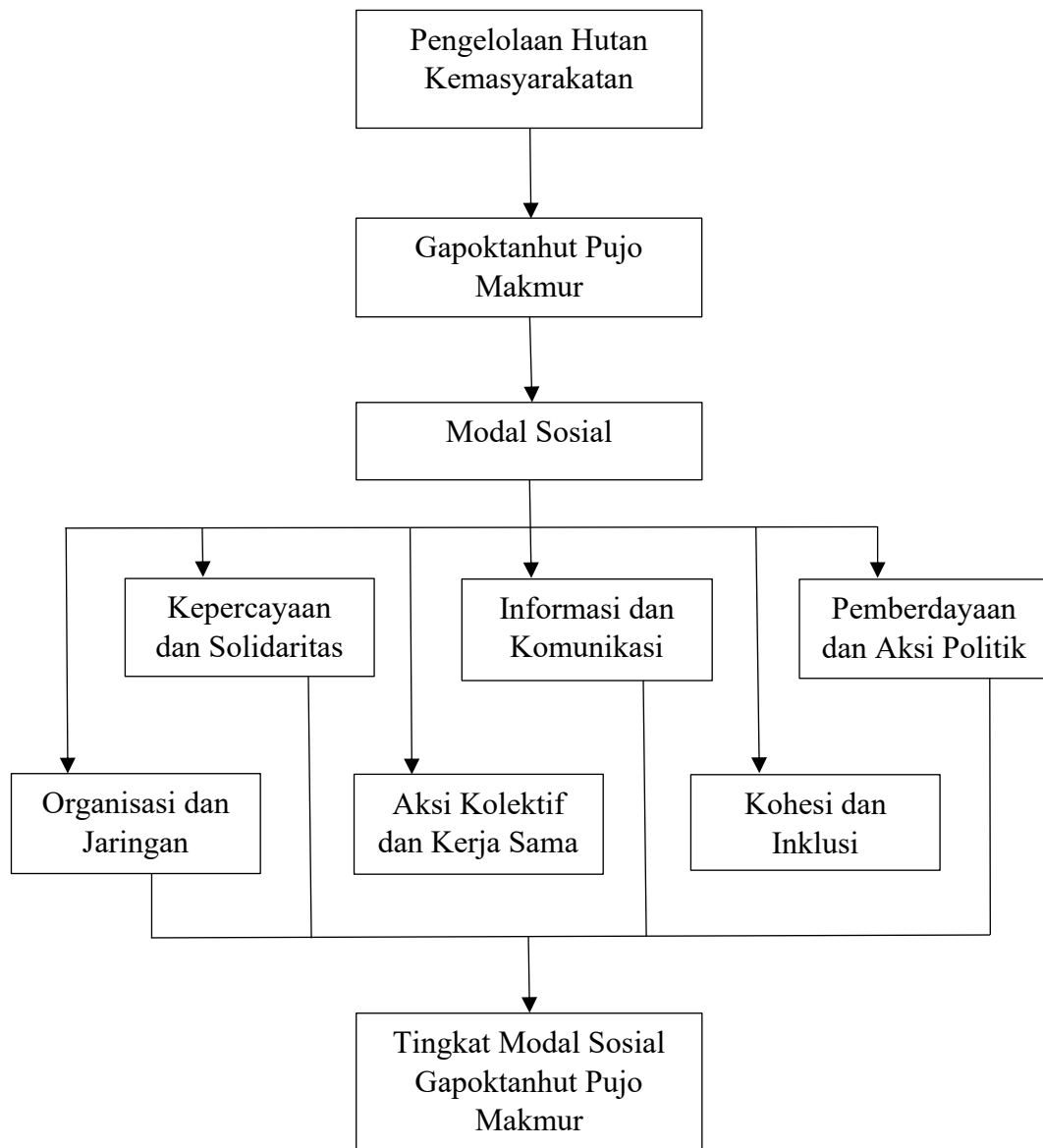
1.3. Tujuan Penelitian

- 1 Mengidentifikasi unsur modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur KPH Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
- 2 Mengevaluasi tingkat modal sosial masyarakat terkait pengelolaan hutan kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur, KPH Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

1.4. Kerangka Pemikiran

Sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat di lokasi Hutan Kemasyarakatan dapat diolah dan memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Salah satu lokasi yang masyarakat turut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan serta memiliki unsur modal sosial dalam pengelolaannya adalah Gapoktanhut Pujo Makmur, Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH) Pesawaran. Modal sosial yang dimaksud terdiri dari enam unsur utama, yaitu aksi kolektif dan kerja sama, kepercayaan dan solidaritas, Organisasi dan jaringan, informasi dan komunikasi, kohesi sosial dan inklusi, serta pemberdayaan dan aksi politik. Keenam unsur modal sosial berperan penting dalam membentuk tingkat keterlibatan masyarakat, pola pengambilan keputusan, pelaksanaan tata kelola hutan, hingga keberhasilan pengelolaan agroforestri. Identifikasi dan pengukuran setiap unsur modal sosial diperlukan untuk memahami bagaimana karakteristik hubungan antara manusia dan lingkungan bisa menjadi modal utama dalam pelaksanaan dan pengembangan HKM. Diharapkan akan tercipta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan ini, dibutuhkan informasi langsung dari masyarakat selaku pelaku utama dalam pengelolaan dan pengembangan lokasi dengan wawancara. Runtutan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Lokasi Penelitian

Letak geografis KPH Pesawaran di Kecamatan Padang Cermin $105^{\circ}3'41.28''$ – $105^{\circ}10'14.88''$ BT dan $5^{\circ}37'6.25''$ – $5^{\circ}47'15.61''$ LS. KPH Pesawaran sebagian kawasan Hutan Lindung Register 20 Pematang Kubuato yang berada di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan luas lahan ± 11.204 ha. Kemudian, berdasarkan Tata Hutan BPKH Wilayah II Palembang tahun 2013, luas wilayah KPH Pesawaran berubah menjadi 10.903,56 ha (Kesatuan Pengelolaan Hutan Pesawaran, 2015). Berdasarkan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, hutan dibagi ke dalam tiga fungsi, yaitu hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi (Arba dan Yuniansari, 2023). Tata hutan pada KPH Pesawaran dikelola berdasarkan blok. Wilayah pengelolaan KPH Pesawaran terbagi menjadi 3 blok, yaitu blok inti, blok pemanfaatan hutan lindung dan blok pemanfaatan hutan produksi. Berdasarkan kondisi tutupan lahannya, di KPH Pesawaran terdapat beberapa potensi alam yang didapatkan, yaitu adanya potensi kayu di mana yang paling besar ditanam adalah Gintung (*Bischofia javanica*), Kelempunya (*Neoloamarckia cadamba*), Laosan, Marak dan Rempelas. Untuk potensi tanaman unggul program Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) KPH Pesawaran seperti pala, cengkeh, serai wangi, kapulaga, kemiri dan nilam (Mayuddin *et al.*, 2024).

KPH Pesawaran memiliki Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut), salah satunya adalah Gapoktanhut Pujo Makmur. Gapoktanhut Pujo Makmur merupakan salah satu gabungan kelompok tani hutan yang mendapatkan izin HKm sejak tahun 2021 seluas 534 ha di dalam kawasan hutan lindung Pematang Kubuato Register 20 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pesawaran (Duryat *et*

al., 2024). Secara administratif, di Dusun Pujo Raharjo, Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, terdapat 5 (lima) Kelompok Tani Hutan (KTH): KTH Pujo Makmur, KTH Wono Harjo, KTH Citra Tani, KTH Serumpun Jaya, dan KTH Pujo Raharjo (Gapoktanhut Pujo Makmur, 2021).

Petani hutan Gapoktanhut Pujo Makmur memanfaatkan lahan hutan kemasyarakatan dengan menanam berbagai jenis tanaman kehutanan dan nonkehutanan. Dalam pengelolaannya, petani diberikan izin mengelola lahan hutan dengan syarat tidak menebang pohon, sehingga petani mengombinasikan berbagai jenis tanaman untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas lahan secara berkelanjutan. Terdapat beberapa keunggulan dalam sistem agroforestri yang diterapkan di Gapoktanhut Pujo Makmur dari sisi ekologis, ekonomi, maupun sosial. Salah satu contoh keunggulannya adalah pada pola penanaman agroforestri kapulaga dan tanaman lainnya di Gapoktanhut Pujo Makmur, terdapat keanekaragaman tanaman dengan 19 spesies dari 13 famili pada agroforestri kapulaga dan 17 spesies dari 11 famili pada non-kapulaga, termasuk komposisi yang terdiri dari tanaman kehutanan, pertanian, MPTs, serta semak-semak (Tsani *et al.*, 2025).

2.2. Perhutanan sosial

Perhutanan sosial merupakan semua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat, baik di kawasan hutan milik negara, milik pribadi, maupun milik kelompok (Sami, 2020). Perhutanan sosial adalah konsep yang memberikan akses dan hak kepada masyarakat lokal untuk mengelola serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan (Pambudi, 2023). Sistem perhutanan sosial memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan agroforestri, di mana pola agroforestri memiliki prospek yang baik dan menjanjikan bagi petani untuk mencapai tujuan bersama (Roslinda *et al.*, 2023). Di bawah skema perhutanan sosial, masyarakat mendapatkan izin pengelolaan hutan, namun kepemilikan tanah tetap di tangan negara (Batalipu *et al.*, 2023).

Program perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan akses pengelolaan hutan negara bagi

masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan hutan (Lawasi, 2024). Program ini dianggap sebagai pendekatan strategis untuk mengatasi deforestasi, degradasi lingkungan dan kemiskinan serta berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan (Zuraidah *et al.*, 2022). Selain itu, program ini juga dimaksudkan sebagai solusi atas permasalahan tenurial dan sebagai upaya keadilan bagi masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan sumber daya hutan untuk kesejahteraan dan pelestarian lingkungan (Toha *et al.*, 2023). Skema yang dikembangkan dalam perhutanan sosial antara lain Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

1. Hutan Desa

Hutan Desa adalah kawasan hutan negara yang belum dibebani izin atau hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (P.49/Menhut-II/2008). Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan memperoleh akses legal untuk mengelola hutan negara tempat mereka hidup dan bersosialisasi. Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja. Hutan Desa meliputi hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, serta berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan (Salatalohy *et al.*, 2022).

Penyelenggaraan Hutan Desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan desa (Apriandana *et al.*, 2021). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Hutan Desa diatur melalui sebuah lembaga khusus yang disebut Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Lembaga Pengelola Hutan Desa berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa dalam mengelola kawasan hutan secara kolektif, serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hutan yang berada di bawah pengelolaannya (Qurniati *et al.*, 2017).

2. Hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan adalah bentuk pengelolaan hutan negara yang secara khusus diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal yang bergantung pada kawasan hutan. Melalui pemberian izin pemanfaatan, masyarakat mendapat peluang untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, membuka peluang kerja, serta membantu mengatasi masalah sosial dan kemiskinan di sekitar

kawasan hutan. Kelembagaan berperan penting dalam pengelolaan HKm. Hal tersebut disebabkan oleh kelembagaan yang mengatur pengelolaan sumber daya agar tetap berkelanjutan. Adanya kelembagaan dapat menjadi dasar dalam melaksanakan program HKm karena saat ini masih ditemui kendala dan tantangan dalam pengelolaan (Larasati *et al.*, 2021). Dengan kata lain, hutan kemasyarakatan adalah pemberdayaan dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan agar sesuai dengan kebutuhan sehingga kelestarian sumber daya hutan dapat dipertahankan. HKm ditetapkan oleh pemerintah pada masing-masing wilayah (Yani *et al.*, 2017). Partisipasi masyarakat tidak hanya tercermin dalam keterlibatan fisik pada kegiatan pengelolaan hutan, tetapi juga dalam aspek kelembagaan lokal yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program. Efektivitas pengelolaan HKm sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat merasa memiliki dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan keberhasilan pengelolaan hutan berbasis komunitas. Penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberlanjutan HKm (Ajjiah *et al.*, 2022).

3. Hutan Tanaman Rakyat

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan skema pengelolaan hutan produksi yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi dengan tujuan meningkatkan potensi dan kualitas hutan melalui penerapan sistem silvikultur. Program ini dirancang untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar (Arwanda *et al.*, 2021). Keberadaan HTR menjadi salah satu solusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, dengan memberikan akses legal untuk mengelola lahan hutan produksi negara. Melalui skema ini, masyarakat diberi kesempatan untuk membangun dan mengembangkan hutan tanaman, sehingga hasil produksinya dapat dimanfaatkan secara ekonomi (Herwanti dan Kaskoyo, 2019).

Selain mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat, HTR juga berperan penting dalam menumbuhkan praktik kehutanan yang berkelanjutan. Dengan

pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, program ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian hutan (Mujetahid *et al.*, 2021). Dengan keterlibatan aktif masyarakat, HTR juga mendorong terciptanya rasa memiliki terhadap sumber daya hutan, sehingga pengelolaan menjadi lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Di sisi lain, program ini turut memperkuat ketahanan sosial ekonomi desa melalui diversifikasi sumber pendapatan berbasis kehutanan.

4. Kemitraan Kehutanan

Kemitraan kehutanan merupakan salah satu skema yang dikembangkan sebagai pengganti dari skema sebelumnya, yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Ramadhan *et al.*, 2022). Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau kesatuan pengelolaan hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan, dan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan (Ricco *et al.*, 2017). Skema ini menjadi dasar kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses legal kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu guna memenuhi kebutuhan hidup (Wulandari *et al.*, 2024). Program perhutanan sosial di kawasan konservasi yang dikenal sebagai kemitraan kehutanan tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun. Dalam regulasi tersebut, kemitraan kehutanan didefinisikan sebagai bentuk kerja sama pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan atau pemegang izin pemanfaatan hutan.

Kewajiban dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan juga diatur dalam Pasal 244 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perizinan Pemanfaatan Hutan. Dalam skema ini, aspek kelembagaan masyarakat, jenis komoditas yang dibudidayakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme pembagian hasil pemanfaatan diatur melalui kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK) (Azizah *et al.*, 2024). Kemitraan kehutanan juga merupakan upaya strategis untuk mengatasi permasalahan degradasi, deforestasi, dan perambahan hutan. Melalui pola kemitraan dalam

pengelolaan hutan, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mencegah terjadinya konflik (Wandira *et al.*, 2020).

5. Hutan Adat

Hutan Adat merupakan hutan yang dimiliki oleh suatu marga atau komunitas adat, yang menjadi warisan nenek moyang dan dikelola secara bersama dalam wilayah ulayat dengan sistem kelembagaan dan aturan adat sendiri. Dalam konteks ini, masyarakat adat memiliki hak penuh sebagai pengelola hutan tersebut tanpa campur tangan dari pemerintah atau negara. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penguasaan dan pengelolaan hutan adat sepenuhnya berada di tangan masyarakat adat, sehingga hak konstitusional masyarakat dapat dikembalikan. Putusan MK ini merupakan keputusan penting yang menyerahkan status kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan hutan adat dari negara kepada masyarakat adat. Secara konstitusional, putusan tersebut mengakui keberadaan hutan adat dan masyarakat hukum adat, meskipun tidak mengatur secara lengkap persyaratan pengakuan keberadaan masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kehutanan (Saragih *et al.*, 2023). Hutan Adat merujuk pada kawasan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, di mana pengelolaannya dilandasi oleh norma maupun aturan adat setempat. Pengakuan negara terhadap Hutan Adat melalui putusan Mahkamah Konstitusi menjadi landasan penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal terkait pengelolaan sumber daya hutan (Burhani, 2025).

2.3. Hutan Kemasyarakatan

Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan kawasan hutan milik negara yang dapat dikelola oleh masyarakat dengan tujuan menambah pendapatan masyarakat tanpa merusak fungsi hutannya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Program hutan kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang dikelola langsung oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat berdasarkan aspek lingkungannya (Ramadani *et al.*, 2021). Program HKm memberikan dampak yang positif pada

petani anggota HKm berupa perubahan aset-aset penghidupan masyarakat seperti modal sosial (Ayu *et al.*, 2022). Hutan kemasyarakatan menekankan pentingnya pelestarian ekologi tanpa meninggalkan kepentingan sosial ekonomi masyarakat setempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani dari kegiatan agroforestri di areal HKm adalah luas areal garapan, jumlah jenis tanaman yang sudah berproduksi dan pelatihan yang diikuti oleh petani (Puspasari *et al.*, 2017). Penerapan hutan kemasyarakatan akan meningkatkan akses dan kapasitas pengelolaan hutan yang lestari pada masyarakat sekitar kawasan hutan serta dapat menjamin ketersediaan suatu lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran dan menjadi solusi dari permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat (Syafitri *et al.*, 2024).

Pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm) masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya masih kurang ketatnya kebijakan tentang pemanfaatan hutan yang mengakibatkan banyaknya kerusakan sumber daya hutan akibat eksploitasi, serta pendapatan masyarakat yang menurun karena semakin sulitnya mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya hutan (Perdana *et al.*, 2021). Maka dengan itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm sangat penting untuk mencapai keberhasilan program ini. Faktor-faktor seperti kelompok dan jaringan, kepercayaan dan solidaritas, aksi kolektif dan kerja sama, informasi dan komunikasi, kohesi dan inklusi sosial, dan juga pemberdayaan dan aksi dapat memengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Dengan demikian, penguatan modal sosial menjadi kunci dalam pengelolaan HKm yang efektif (Puspita, 2019).

Efektivitas pengelolaan HKm dipengaruhi oleh pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan dan kesepakatan bersama menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk bimbingan teknis dan pengawasan juga sangat penting. Dengan sinergi antara masyarakat dan pemerintah, pengelolaan HKm dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan HKm juga berdampak pada kinerja kelembagaan lokal. Keterlibatan lembaga adat dan kelompok tani dalam pengelolaan hutan dapat memperkuat struktur sosial di masyarakat (Pratami *et al.*, 2022).

2.4. Modal Sosial

Konsep modal sosial pertama kali diperkenalkan oleh Lyda Judson Hanifan pada tahun 1916, yang memaknainya bukan sebagai aset material, melainkan sebagai sumber daya nonfisik yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Modal sosial merujuk pada kumpulan nilai dan norma yang bersifat informal dan terbagi secara spontan di antara anggota suatu kelompok, sehingga memungkinkan terjalinnya kerja sama sosial (Fukuyama, 2002). Unsur-unsur seperti niat baik, rasa persahabatan, simpati, serta hubungan dan kolaborasi antarindividu maupun keluarga menjadi bagian integral dari modal sosial dalam komunitas. Portes (2000) membedakan modal sosial ke dalam dua kategori, yaitu aset milik individu dan aset kolektif. Sementara itu, Woolcock (1998) mendeskripsikan modal sosial sebagai kumpulan informasi, kepercayaan, dan norma timbal balik yang melekat dalam jaringan sosial seseorang. Cox (1995) turut menekankan pentingnya jaringan, norma, dan kepercayaan sosial dalam memperlancar koordinasi dan kolaborasi demi kepentingan bersama. Secara keseluruhan, modal sosial terdiri atas aturan, kewajiban, norma timbal balik, dan kepercayaan yang membentuk struktur sosial serta institusi masyarakat, sehingga memungkinkan anggota komunitas mencapai tujuan baik secara individu maupun kolektif.

Modal sosial merupakan hal yang akan terus-menerus ada untuk kehidupan sehari-hari, baik bagi individu maupun kelompok menuju tujuan bersama. Hubungan ini terbentuk melalui interaksi sehari-hari yang dilandasi oleh rasa saling percaya, nilai kebersamaan, serta norma sosial yang berlaku. Modal sosial memiliki peran yang penting dalam kemajuan kehidupan masyarakat karena modal sosial mampu menjadi dasar pembangunan manusia, ekonomi, sosial dan politik (Nurindah, 2021). Kajian mengenai modal sosial penting dilakukan karena berperan strategis dalam membangun ikatan sosial yang kuat, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan unsur modal sosial yang paling berpengaruh di masyarakat. Modal sosial yang kuat juga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan hutan (Heryanto, 2020).

Pemahaman tentang modal sosial terus diperluas dan diperkuat oleh berbagai penelitian terbaru. Misalnya, menurut Putra *et al.* (2022), modal sosial kini juga dipandang sebagai faktor penting dalam memperkuat resiliensi masyarakat menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Studi oleh Fan *et al.* (2023) menegaskan bahwa modal sosial yang kuat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kohesi sosial, terutama di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi. Dengan demikian, modal sosial tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga semakin penting dalam dinamika masyarakat modern saat ini.

Modal sosial memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya hutan, terutama dalam konteks perhutanan sosial. Modal sosial mencakup elemen seperti kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang dapat mendorong kerja sama dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan (Puspita *et al.*, 2020). Keberadaan modal sosial yang kuat dapat meningkatkan efektivitas program perhutanan sosial dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan konservasi. Hal ini sejalan dengan temuan Nababan (2015), yang menunjukkan bahwa modal sosial berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Modal sosial mempunyai enam pilar utama menurut Grootaert *et al.*, 2004; Dudwick *et al.*, 2006; Jones dan Woolcock 2007:

a. Organisasi dan Jaringan

Organisasi adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Sedangkan jaringan adalah hubungan konektif yang menghubungkan individu maupun kelompok dalam suatu sistem sosial yang memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya. Jaringan sosial tidak hanya sekadar hubungan antarindividu, tetapi juga mencakup pola interaksi yang memengaruhi perilaku dan keputusan kelompok. Variabel jaringan sosial memiliki beberapa indikator yang termasuk di dalamnya, seperti adanya partisipasi, pertukaran timbal balik, solidaritas, kerja sama, dan keadilan (Suparyana *et al.*, 2022). Jaringan sosial berperan penting dalam memperkuat modal sosial dan meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam kelompok.

b. Kepercayaan dan Solidaritas

Kepercayaan adalah kesiapan seseorang untuk bergantung pada orang lain berdasarkan keyakinan terhadap integritas dan kemampuannya. Kepercayaan ini erat kaitannya dengan solidaritas, yaitu perasaan kebersamaan, kesatuan tujuan, dan empati antaranggota kelompok. Kepercayaan merupakan fondasi utama modal sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi sosial, sehingga meningkatkan kemampuan kelompok dalam menghadapi tantangan bersama. Solidaritas antarindividu tercermin dari rasa kebersamaan yang terjalin di antara anggota kelompoknya. Kerukunan dan persatuan masyarakat yang kental dapat dilihat dari tradisi saling mengunjungi teman atau saudara (*silaturahmi*), pertukaran informasi, pengalaman, dan kebersamaan (Qurniati *et al.*, 2017).

c. Aksi Kolektif dan Kerjasama

Aksi kolektif adalah proses pengambilan keputusan bersama yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Kerja sama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Modal sosial berperan dalam meningkatkan kesadaran bersama terhadap berbagai peluang yang bisa digunakan, sedangkan kegiatan aksi kolektif menjadi metode efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan aksi kolektif dan sikap kooperatif terlihat dari interaksi antaranggota dalam suatu kelompok maupun saat menghadapi masalah atau situasi krisis (Nugraha, 2022).

d. Aspek Informasi dan Komunikasi

Komunikasi dan informasi adalah proses di mana individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat menciptakan, menyebarkan, dan menggunakan informasi untuk membangun hubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Modal sosial dapat dilihat sebagai saluran komunikasi yang efektif antarindividu dan kelompok. Komunikasi yang efektif antarindividu dan kelompok. Komunikasi yang baik memperkuat hubungan sosial dan mendukung pertukaran informasi yang positif (Usman *et al.*, 2024).

e. Aspek Kohesi Sosial dan Inklusi

Kohesi sosial dan inklusi merujuk pada rasa nyaman dan diterimanya individu ketika bergabung dan berinteraksi dalam suatu kelompok, yang menciptakan rasa kebersamaan dan mengurangi perasaan terasing. Kohesi dan inklusi adalah ikatan

sosial yang kuat dan potensi kemampuan untuk mengikutsertakan atau mengecualikan anggota komunitas. Kohesi dan inklusi dapat merepresentasikan rasa aman dalam pemenuhan kebutuhan, memicu konflik dalam kelompok, dan mengucilkan anggota dari berbagai kegiatan. Kohesi dan inklusi sosial memberikan kenyamanan pribadi dalam bergabung dan berinteraksi dalam kelompok.

f. Aksi Pemberdayaan dan Aksi Politik

Modal sosial berperan penting dalam aksi pemberdayaan masyarakat dengan menjadi elemen penguat jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi. Dalam konteks aksi pemberdayaan, modal sosial memfasilitasi peningkatan akses informasi, kapasitas organisasi, dan inklusivitas yang memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok produktif dan gotong royong yang memacu kemajuan komunitas secara berkelanjutan. Sementara itu, dalam aksi politik, modal sosial berfungsi sebagai sumber daya sosial yang memperkuat jaringan dan kepercayaan antara aktor politik dan masyarakat, meningkatkan efektivitas kampanye dan partisipasi politik, terutama di era digital dengan peran media sosial dalam membangun dukungan dan legitimasi politik. Modal sosial sebagai fondasi interaksi dan kerja sama sosial menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan kedua aksi tersebut secara sinergis (Kusmin, 2023).

Pentingnya modal sosial dalam pengelolaan hutan juga terlihat dalam konteks kemitraan kehutanan. Kerja sama yang baik ini berkontribusi pada pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, modal sosial dapat mendukung program perhutanan sosial dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program (Zuraidah *et al.*, 2022). Dengan modal sosial yang kuat, masyarakat lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam program perhutanan sosial, seperti hutan tanaman rakyat atau hutan kemasyarakatan. Hal ini dapat meningkatkan keberhasilan program dan memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

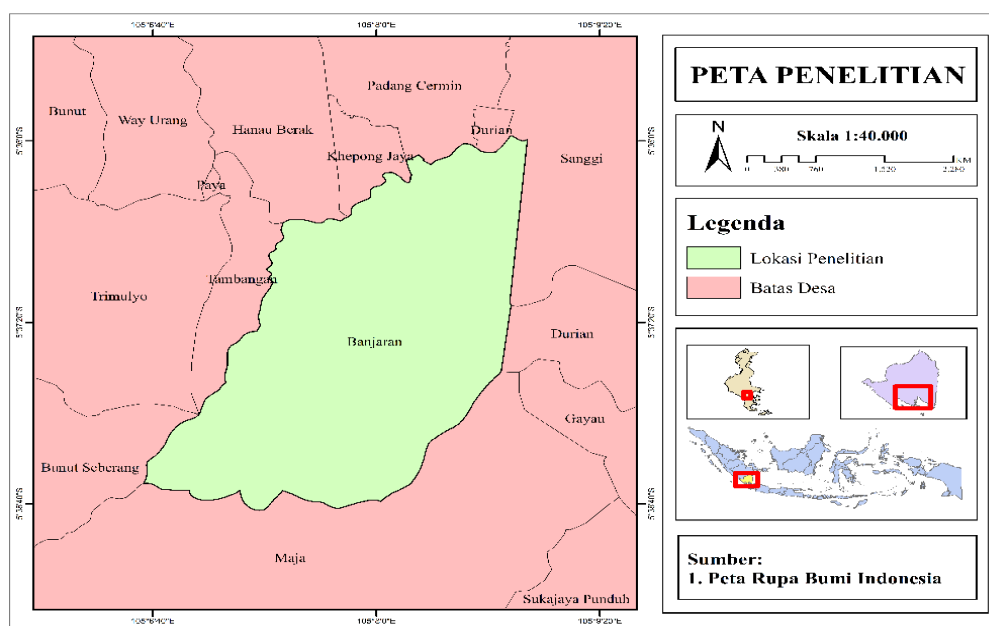
Secara keseluruhan, modal sosial merupakan aset penting dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Keberadaan modal sosial yang kuat dapat meningkatkan partisipasi, kerja sama, dan efektivitas program pengelolaan hutan.

Dengan demikian, upaya penguatan modal sosial, seperti membangun kepercayaan, memperkuat jaringan sosial, dan mempromosikan norma positif, perlu menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan hutan (Isnain, 2024). Dengan demikian, kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara harmonis. Namun, perlu dicatat bahwa modal sosial tidak selalu berdampak positif jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, jaringan sosial yang eksklusif dapat menghambat partisipasi kelompok lain atau menciptakan ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa modal sosial yang ada bersifat inklusif dan mendukung keadilan sosial dalam pengelolaan hutan. Pendekatan ini dapat meningkatkan keberlanjutan pengelolaan hutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sabar *et al.*, 2022).

III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2025 di Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Pujo Makmur, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran, Dusun Pujo Raharjo, Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Lokasi penelitian ini dipilih karena pada tahun 2023 Gapoktanhut Pujo Makmur menerima penghargaan sebagai Mitra Kerja Terbaik di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-40, serta pada Festival Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan pada 21 Agustus 2025. Kabupaten Pesawaran, menerima penghargaan kategori Pemerintah Daerah terbaik dalam mendukung program Perhutanan Sosial.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

3.2. Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat tulis kantor (ATK), kuesioner, laptop/komputer dan kamera/handphone. Objek penelitian ini adalah anggota Gapoktanhut Pujo Makmur di KPH Pesawaran yang terlibat langsung dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm).

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

3.3.1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data yang akan dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner dari petani agroforestri KPH Pesawaran. Contoh datanya adalah 1) karakteristik individu responden, yaitu umur, jenis kelamin, agama, pendidikan formal, pendidikan nonformal, status tempat tinggal, pendapatan rumah tangga (Rp/bulan), jumlah anggota keluarga yang bekerja, jumlah tanggungan keluarga, rata-rata lama tinggal (orang/tahun) dan suku (orang). 2) modal sosial yaitu kelompok dan jaringan, kepercayaan dan solidaritas, aksi kolektif dan kerja sama, kohesi dan inklusi sosial, informasi dan komunikasi, dan pemberdayaan dan aksi politik.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mencari, menganalisis, mengumpulkan, mempelajari buku-buku dan literatur lainnya yang dipakai sebagai bahan referensi, misalnya data gambaran umum Gapoktanhut Pujo Makmur, Dusun Pujo Raharjo, Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

3.3.2. Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung di lapangan yang dibantu dengan kuesioner dan observasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi penting terkait data primer yang

dibutuhkan. Selain itu, studi pustaka juga dilakukan untuk menambah informasi data melalui berbagai sumber seperti jurnal, buku dan artikel lainnya.

3.4. Populasi dan Pengambilan Sampel

Gapoktanhut Pujo Makmur memiliki lima Kelompok Tani Hutan (KTH). Anggota Gapoktanhut keseluruhan berjumlah 205 orang petani dimana KTH Pujo Makmur memiliki anggota sebanyak 43 orang, KTH Wono Harjo memiliki anggota sebanyak 31 orang, KTH Citra Tani memiliki anggota sebanyak 41 orang, KTH Serumpun Jaya memiliki anggota sebanyak 50 orang dan KTH Jaya Tani memiliki anggota sebanyak 40 orang

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan *simple random sampling* karena jumlah populasi anggota yang banyak (lebih dari 100), maka dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Banyak sampel yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel (responden)

N = Ukuran populasi

e = Tingkat kesalahan yang masih ditolerir sebesar 10 %

1 = Bilangan konstan

Pengambilan sampel yang dilakukan di Gapoktanhut Pujo Makmur

$$n = \frac{205}{1 + 205(0,1)^2} = \frac{205}{3,05} = 67 \text{ sampel}$$

Berdasarkan perhitungan, diperoleh jumlah sampel sebanyak 67 responden.

Untuk sampel dari masing-masing KTH, dihitung dengan menggunakan rumus yaitu:

$$n = \frac{N_i}{N} \times ni$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel yang akan diambil pada setiap kelompok

N : Jumlah total populasi pada semua kelompok

N_i : Jumlah populasi pada kelompok ke (i)

n_i : Jumlah sampel pada semua kelompok

Pengambilan sampel yang dilakukan di Gapoktanhut Pujo Makmur pada setiap KTH adalah:

$$\text{Kelompok Tani Hutan Pujo Makmur} = \frac{43}{205} \times 67 = 14$$

$$\text{Kelompok Tani Hutan Wono Harjo} = \frac{31}{205} \times 67 = 10$$

$$\text{Kelompok Tani Hutan Citra Tani} = \frac{41}{205} \times 67 = 14$$

$$\text{Kelompok Tani Hutan Serumpun Jaya} = \frac{50}{205} \times 67 = 16$$

$$\text{Kelompok Tani Hutan Jaya Tani} = \frac{40}{205} \times 67 = 13$$

Tabel 1. Jumlah Responden per KTH

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Sampel
1	Kelompok Tani Hutan Pujo Makmur	43	14
2	Kelompok Tani Hutan Wono Harjo	31	10
3	Kelompok Tani Hutan Citra Tani	41	14
4	Kelompok Tani Hutan Serumpun Jaya	50	16
5	Kelompok Tani Hutan Jaya Tani	40	13
	Jumlah	205	67

3.5. Analisis Data

Analisis data adalah metode yang dapat menjelaskan dan menerangkan data yang ada ke dalam bentuk kalimat yang dapat dimengerti. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui tabulasi silang secara terpisah terhadap enam elemen modal sosial. Uraian enam elemen modal sosial dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yang akan digunakan untuk menguji unsur modal sosial. Permasalahan pada unsur modal sosial yang dapat menjawab tujuan pertama mengenai unsur-unsur modal sosial dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Unsur-Unsur Modal Sosial

No	Unsur-unsur Modal Sosial	Indikator	Nomer Kuesioner
1.	Jaringan dan Organisasi	1. Ketersediaan dan akses kelompok 2. Partisipasi dalam organisasi sosial dan kelompok tani	1. 1 sampai 5 2. 6 sampai 10
2.	Kepercayaan dan Solidaritas	1. Tingkat kepercayaan antar anggota 2. Sejauh mana orang merasa bisa mengandalkan orang lain	1. 1 sampai 4 2. 5 samapai 7
3.	Aksi Kolektif dan Kerja Sama	1. Tingkat keterlibatan dalam kegiatan kolektif 2. Ketersediaan bekerja sama dalam kegiatan kelompok	1. 1 sampai 2 2. 3 sampai 5
4.	Informasi dan Komunikasi	1. Sumber informasi yang digunakan masyarakat 2. Sarana komunikasi yang dipakai dalam kelompok	1. 1 dan 2 2. 2, 4, dan 5
5.	Kohesi Sosial dan Inklusi	1. Tingkat keterlibatan anggota dalam keputusan 2. Tingkat konflik dan penyelesaian di kelompok	1. 4 dan 5 2. 1, 2, dan 3
6.	Pemberdayaan dan Aksi Politik	1. Kemampuan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari 2. Partisipasi dalam kegiatan politik lokal atau advokasi terkait hutan	1. 1 dan 2 2. 3 dan 4

Tingkat modal sosial dianalisis dengan membandingkannya dengan tingkat kelas yang ditetapkan oleh Uphoff (1999). Tingkat kelas dibagi menjadi kategori minimum, dasar, substansial dan maksimum. Kategori tingkat modal sosial menurut Uphoff (1999) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kontinum Modal Sosial (Uphoff 1999)

Karakteristik	Modal Sosial Minimum	Modal Sosial Dasar	Modal Sosial Substansial	Modal Sosial Maksimum
Komitmen terhadap kesejahteraan	Tidak peduli pada kesejahteraan orang lain, lebih mementingkan kepentingan pribadi	Hanya peduli pada kesejahteraan diri sendiri, bekerja sama ketika merasa diuntungkan saja	Komitmen terhadap usaha bersama, akan bekerja sama karena bermanfaat juga bagi orang lain	Komitmen terhadap kesejahteraan orang lain, selalu bekerja sama tanpa mencari untung
Nilai-nilai	Angkuh	Efisiensi kerja sama	Efektivitas kerja sama	Peduli sesama
Masalah	Egois	Biaya transaksi	Aksi kolektif	Pengorbanan diri
Strategi	Otonomi	Kerja sama taktik	Kerja sama strategis	Peleburan minat
Saling Menguntungkan	Tidak dipertimbangkan	Instrumental	Dilembagakan	Transenden
Pilihan	Keluar setiap tidak puas	Ragu untuk berpendapat	Pendapat perlu diperjelas	Menerima hasil jika baik untuk semua
Teori Permainan	Bersaing akan kepentingan	Memaksimalkan kepentingan sendiri yang masih ada manfaat untuk orang lain	Memaksimalkan kepentingan sendiri dan orang lain untuk saling menguntungkan	Memaksimalkan kepentingan orang lain untuk keuntungan bersama
Fungsi Utilitas	Saling bergantung, dengan hanya pada utilitas sendiri	Mandiri, dengan utilitas sendiri yang ditingkatkan melalui kerja sama	Saling bergantung dengan orang lain untuk kepentingan orang lain	Sangat bergantung untuk kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Unsur modal sosial masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur KPH Pesawaran tercermin melalui enam elemen utama: organisasi dan jaringan, kepercayaan dan solidaritas, aksi kolektif dan kerja sama, informasi dan komunikasi, kohesi sosial dan inklusi, serta pemberdayaan dan aksi politik yang telah terbentuk dan berperan, dengan kekuatan pada tingginya kepercayaan, solidaritas, dan struktur organisasi yang jelas, namun kelemahan masih terdapat pada partisipasi dalam aksi kolektif, keterbatasan informasi dan komunikasi, rendahnya jejaring eksternal, serta pemberdayaan yang belum optimal, sehingga perlu penguatan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan HKm.
2. Tingkat modal sosial masyarakat di Gapoktanhut Pujo Makmur berada pada kategori dasar hingga substansial berdasarkan kontinum Uphoff (1999). Pada tingkat dasar, modal sosial ditunjukkan oleh nilai-nilai, strategi, dan pilihan anggota sebagai landasan tindakan kolektif. Pada tingkat substansial, modal sosial tercermin dalam komitmen terhadap kesejahteraan, kemampuan menyelesaikan masalah, serta kerja sama yang saling menguntungkan, yang diperkuat oleh pertimbangan rasional melalui teori permainan dan fungsi utilitas, menunjukkan bahwa modal sosial telah berkembang dari sekadar norma menjadi praktik yang memberikan manfaat nyata bagi anggota kelompok.

5.2. Saran

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan melalui

pelatihan manajemen organisasi, kepemimpinan, serta advokasi kebijakan agar masyarakat lebih mampu memperjuangkan kepentingan di tingkat lokal maupun regional. Selain itu, perluasan jaringan kerja sama dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi sangat penting untuk meningkatkan akses terhadap informasi, pendanaan, serta dukungan teknis yang dapat memperkuat keberlanjutan pengelolaan hutan. Di sisi lain, pemberdayaan politik masyarakat juga perlu ditingkatkan agar modal sosial yang telah terbentuk tidak hanya berfungsi dalam lingkup internal kelompok, tetapi juga mampu memberikan pengaruh pada kebijakan pengelolaan hutan di tingkat yang lebih luas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, R., Isranda, C., Ananda, N. S., Kurniawan, A. dan Ramadhan, F. (2024). Hubungan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Kelompok Tani (Studi Kasus Kelompok Tani Tandilau Di Nagari Durian Gadang, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota). *Journal Pertanian UMSB*. 8(2).
- Ajjiah, L. N., Safe'i, R. dan Yuwono, S. B. (2022). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di Hkm Harapan Sentosa KPHL Batutegi. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*. 6(2): 114–120.
- Alamsyah, M. N. dan Rusdin, R. B. (2025). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.
- Alwi, A. (2025). Solidaritas sosial masyarakat transmigran asal Jawa Barat di Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. 5(1): 14–14.
- Anshori, M. W., Syahrier, F. A., Ahmad, Z. H., Pratama, G., Sazeta, M., dan Romadhon, A. (2025). Penyelesaian Konflik Agraria dengan Skema Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Bukit Kapur. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*. 6(2): 247–261.
- Ansori, I. dan Jaya, C. K. (2025). Komunikasi Dakwah di Era Digital. *Jurnal Manajemen Dakwah*. 3(1): 01–16.
- Apriandana, F., Safe'i, R., Febryano, I. G. dan Kaskoyo, H. (2021). Pengelolaan hutan desa di KPH Wilayah VIII Semendo dari perspektif kinerja kelembagaan. *J Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 18: 185–204.
- Arba, M. dan Yuniansari, R. (2023). Perlindungan hutan dan fungsinya bagi kehidupan manusia dan lingkungan alam. *Jurnal Kompilasi Hukum*. 8(2).

- Arum, P. S., Ibrahim, J. T., dan Bakhtiar, A. (2023). The Effect of Social Capital on Farmer Welfare. *Agriecobis: Journal of Agricultural Socioeconomics and Business*. 6(02): 180–188.
- Arwanda, E. R., Safe'i, R., Kaskoyo, H. dan Herwanti, S. (2021). Identifikasi Kerusakan Pohon pada Hutan Tanaman Rakyat PIL, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. *Agro Bali: Agricultural Journal*. 4(3): 351–361.
- Ayu, H. Y., Kaskoyo, H., dan Yuwono, S. B. (2022). Penilaian dampak hutan terhadap kemasyarakatan melalui *Sustainable Livelihoods Framework*. *Journal Hutan Tropis Volume*. 10(1).
- Azizah, S. N., Priyanta, M., dan Astriani, N. (2024). Konsep kemitraan kehutanan dalam pengaturan program perhutanan sosial di Kabupaten Cianjur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Media Bina Ilmiah*. 18(6): 1443–1456.
- Batalipu, A. H. S. M., Asyysifa, A. dan Rezekiah, A. A. (2023). Kontribusi Usaha Perhutanan Sosial terhadap Pendapatan Anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Desa Sungai Bakar, Kabupaten Tanah Laut. *Journal Sylva Scientiae*. 6(4): 567–575.
- Bennet, W.L. dan Segerberg, A. (2020). The logic of connective action: digital media and the personalization of connective politics. *Information, Communication & Society*. 23(5):694–710.
- Budhi, S. (2025). Solidaritas Sosial Suku Dayak Tomun pada Ritual Tiwah di Desa Parit, Kabupaten Kotawaringin Timur. *Huma: Jurnal Sosiologi*. 4(4): 456–466.
- Burhani, M. I. (2025). Integrasi nilai adat dan Islam dalam konservasi Hutan Adat Mandala (Studi Kasus Adat Awig-awig di Desa Adat Bayan). *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. 3(3): 1072–1086.
- Cox Eva. (1995). *A Truly Civil Society*. ABC Books. Sydney.

- Dudwick N., Kuehnast K., Jones VN. dan Woolcock M. (2006). *Analyzing social capital in context. A guide to using qualitative methods and data*. World Bank Publications.
- Duryat, D., Bintoro, A., Asmarahman, C., Riniarti, M., dan Imron, I. (2024). Biochar Sebagai Pembenh Tanah Untuk Pertanian Regeneratif Pada Lahan Gapoktanhut Pujo Makmur, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Tanggamus. *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan*. 3(2); 129-143
- Fan, J., Guo, X., Liu, X. dan Xue, X. (2023). Research on Users' Exercise Behaviors of Online Exercise Community Based on Social Capital Theory. *Systems*. 11(8): 411.
- Farid, M., Ibrahim, T., dan Arifudin, O. (2025). Mekanisme pengambilan keputusan berbasis sistem informasi manajemen dalam lembaga pendidikan Islam. *Journal Tahsinia*. 6(1): 86–103.
- Fikry, M. Y. dan Sarjan, M. (2024). Peran agroforestri dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. *LAMBDA: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya*. 4(1): 16-22.
- Fukuyama, F. (2002). *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*. Department of Sociology, University of Oxford. Oxford.
- Gapoktanhut Pujo Makmur. (2021). *Profil Gabungan Kelompok Tani Hutan Pujo Makmur*. Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Lampung.
- Grootaert C., Narayan D., Jones VN. dan Woolcock M. (2004). *Measuring social capital: an integrated questionnaire*. World Bank working paper 18. The World Bank, Washington, D.C.
- Halimatussadiyah, A. (2013). *Social capital to strengthen environmental collective action in Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Handayani, W. A., Tedjaningsih, T., dan Rofatin, B. (2019). Peran kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas usahatani padi. *Jurnal Agristan*. 1(2).

- Hanum, I. M., Qurniati, R. dan Herwanti, S. (2018). Peran Wanita Pedesaan Hutan dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga (The Role of Rural Forest Women in Increasing the Household Income). *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3), 36–45.
- Harjana, A. T., Setiawati, S., Kristiningrum, R. dan Sardjono, M. A. (2024). Penilaian modal sosial Kelompok Tani Hutan (KTH) Sinar Nilam dalam pemanfaatan hutan mangrove. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*. 8(1): 16–29.
- Herdiyanti, S., Sarpin, S., Rahman, R. dan Indra, I. (2022). Peran modal sosial dalam penguatan jaringan kelompok tani hutan di Desa Kapitan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. *Jurnal Penyuluhan Kehutanan*. 16(2): 123–135
- Herwanti, S. dan Kaskoyo, H. (2019). Peran hutan tanaman rakyat dalam meningkatkan pendapatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani. *Belantara*. 2(2): 104–111.
- Heryanto, (2020). Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hicks, H. G. dan Gullett, C. R. (1982). *Organizations: Theory and behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Irawan, B. (2019). Organisasi formal dan informal: tinjauan konsep, perbandingan, dan studi kasus. *Journal of Administrative Reform*. 6(4): 195–220.
- Isnain, M. (2024). *Modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat di Kecamatan Poso Pesisir*. Doctoral dissertation, Universitas Tadulako.
- Jones VN. dan Woolcock M. (2007). *Using mixed methods to assess social capital in low-income countries: a practical guide*. BWPI Working Paper 12. Brooks World Poverty Institute, the University of Manchester, United Kingdom.
- Kartodihardjo, H. (2017). Kelembagaan Hutan Rakyat Studi Kasus Kelompok Tani Taruna Tani Desa Karyasari Kecamatan Leuiliang Bogor. *Risalah*

Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan. 4(3): 226–238.

- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa*. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (Permen LHK No. 4/2023)*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK No. 9/2021)*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Kesatuan Pengelolaan Hutan Pesawaran. (2015). *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Pesawaran periode 2015-2024*. Lampung: Kesatuan Pengelolaan Hutan Pesawaran.
- Kusmin, A. F. (2023). Studi literatur: Peran modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Arajang*. 6(1): 49–58.
- Larasati, A. P., Febryano, I. G., Kaskoyo, H. dan Wulandari, C. (2021). Peran kelembagaan gabungan kelompok tani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. *Belantara*. 4(1): 39–47.
- Lawasi, M. A. (2024). Unveiling the shortcomings of social forestry programs in Indonesia: A critical analysis of farmer empowerment initiatives. *Jurnal Sylva Lestari*. 12(3): 866–889.
- Lubis, RS, Kaskoyo, H., Febryano, IG. dan Bakri, S. (2019). Kontribusi Perempuan Petani Hutan terhadap Penghasilan Keluarga di Hutan Swasta di Desa Air Kubang, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*. 7(2): 186–194.

- Mahyuddin, A., Yuwono, S. B., Bakri, S., Febryanto, I. G., Wulandari, C., dan Kaskoyo, H. (2024). Pengaruh faktor aksesibilitas wilayah dan program kerja kesatuan pengelolaan hutan terhadap tingkat ketertarikan masyarakat pada pengelolaan bisnis minyak atsiri di KPH Pesawaran. *Jurnal Hutan Tropis*. 12(2):171–180.
- Makaruku, N. D. dan Ramdhan, R. M. (2022). Membangun Kepercayaan dan Solidaritas Sosial dalam Ruang Madani Sebelum dan Sesudah Konflik Etnis Terjadi di Maluku. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science and Teaching*. 6(2): 163–180.
- Manyamsari, I. dan Mujiburrahmad, M. (2014). Karakteristik Petani Dan Hubungannya Dengan Kompetensi Petani Lahan Sempit (Kasus: Di Desa Sinar Sari, Kecamatan Dramaga, Kab. Bogor, Jawa Barat). *Jurnal Agriseip Unsyiah*. 15(2): 58–74.
- Margayaningsih, D.I. (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Publiciana*. 11(1):72-88.
- Moeliono, M., Sahide, M. A. K., Bong, I. W., dan Dwisatrio, B. (2023). Social forestry in Indonesia: Fragmented values, progress, contradictions, and opportunities. In *Social value, climate change and environmental stewardship: Insights from theory and practice* (pp. 117–138). Cham: Springer International Publishing.
- Mujetahid, A., Mappangaja, B., Dalya, N. dan Muchtar, A. (2021). Rancangan pembukaan wilayah hutan pada areal hutan tanaman rakyat di Kelompok Tani Hutan Bukit Hijau Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. *Jurnal Satria Seri Ilmu Pengetahuan Alam*. 48(48).
- Nababan, E. J. K. (2015). Modal sosial pada pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(2): 2339–0913.
- Nugraha, A. B. (2022). Memperkuat kelembagaan kerja antardaerah melalui perspektif trust dan modal sosial. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*. 2(1): 69–85.

- Nurindah, A. (2021). Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Olson Jr, M. (1971). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, with a new preface and appendix (Vol. 124)*. Harvard University Press.
- Paloma, C., Hakimi, R., Mutiara, V. I., dan Helmi, H. (2023). Kajian Keragaan Petani Kopi Solok Radjo Di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. *Jurnal Pertanian Agros*. 25(2): 1279–1290.
- Pambudi, A. S. (2023). Capaian, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan perhutanan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. 74–94.
- Perdana, B. C., Baharsyah, S., Syahputra, M. R., dan Danu, R. A. D. (2021). Analisis Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Lombok Timur terhadap Pendapatan Daerah. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. 6(1).
- Prasetyo, M. A. (2025). Strategi dalam meningkatkan produktivitas tanaman agroforestri: Studi kasus Gapoktanhut Pujo Makmur KPH Pesawaran Provinsi Lampung (Skripsi Sarjana). Universitas Lampung.
- Pratama, G. K. dan Reza, M. (2025). Pemetaan Potensi Modal Sosial Dalam Kelompok Tani Di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*. 19(1): 383–402.
- Pratami, I. N., Kamil, E., Yusriadi, Y. dan Arman, A. (2022). Persepsi masyarakat terhadap kinerja penyuluh kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan di Desa Watang Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. *Jurnal Agribis*. 10(2): 161–174.
- Pujantiyo, B. S., dan Rahayu, M. J. (2025). Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Kumuh Mojo. *Jurnal Pengembangan Kota*. 13(1).

- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A. dan Banuwa, I. S. (2017). Aspek sosial ekonomi pada sistem agroforestri di areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(3): 95–103.
- Puspita, N. T. (2019). Modal sosial masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegei. *Jurnal Sylva Lestari*. 8(1): 54-64
- Puspita, Y. (2020). Modal sosial dan kesejahteraan kelompok tani tebu. *Media Trend*. 15(1): 29–40.
- Puteri, W. J. A. dan Puspaningrum, D. (2024). Penerapan model pengembangan masyarakat lokal melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Wisata Rengganis dalam program perhutanan sosial di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. *Jurnal Agribest*. 8(1): 26–37.
- Putnam, R. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*. 6: 65–78.
- Putra, R. D. dan Yuliana, S. (2021). Social capital and community resilience: Evidence from Indonesia. *Cogent Social Sciences*. 7(1): 1–15.
- Qurniati, R., Duryat. dan Kaskoyo, H. (2017). Penguatan kelembagaan pengelola hutan desa di sekitar Gunung Rajabasa, Lampung. *Jurnal Sakai Sambayan*. 1(3): 80–86
- Qurniati, R., Hidayat, W., Kaskoyo, H., Firdasari, F., dan Inoue, M. (2017). Social capital in mangrove management: A case study in Lampung Province, Indonesia. *Journal of forest and environmental science*. 33(1): 8–21.
- Ramadani, R. F., Suryana, T. dan Heryanto, N. (2021). *Community Forest Through Asset-Based Community Development. In the First Transnational Webinar on Adult and Continuing Education (TRACED 2020)*. 105–111. Atlantis Press.
- Ramadhan, R., Syah, D. F. dan Waskhito, N. T. (2022). Effectiveness and Institutional Conditions in Social Forestry Program: Case Study of Forest Village Community Institution (LMDH) Sumber Makmur, Forest Management Unit (KPH) Malang. *Jurnal Sylva Lestari*. 10(1): 141–154.

- Ricco, A., Sumarja, F. X., dan Sulastuti, S. (2017). Kemitraan Akses Hutan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan di Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji Lampung. *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*. 8(1): 37–53.
- Rojas, H., Shah, D. V. dan Friedland, L. A. (2011). A communicative approach to social capital. *Journal of Communication*. 61(4): 689–712.
- Rosada, I., Boceng, A. dan Azis, E. (2021). Partisipasi masyarakat di sekitar hutan dalam program perhutanan sosial. *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*. 5(2): 30–36.
- Roslinda, E., Prisila, F. W. dan Mariani, Y. (2023). The patterns of agroforestry and its contribution to the community income. *Jurnal Sylva Lestari*. 11(3): 543–557.
- Rufaidah, E. dan Harianto, S. P. (2024). Agroforestry development relies on local wisdom (ecological, economic, and social aspects): Case Study from Gapoktan Pujo Makmur, Lampung Province, Indonesia. *In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 1430 (1): 012007.
- Sabar, A., Dassir, M. dan Ita, S. E. N. (2022). Modal sosial masyarakat pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Buhung Lali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Kehutanan Papuasiasia*. 8(1): 94–101.
- Salatalohy, A., Esa, A., dan Hadun, R. (2022). Analisis struktur dan komposisi vegetasi di hutan desa qahabanga kecamatan ternate barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 3(3): 5239–5246.
- Sami, R. G. (2020). Implikasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial terhadap swadaya ekonomi masyarakat dalam program perhutanan sosial: Studi pada Kelompok Tani Nagari Latang Kab. Sijunjung. *Unes Journal of Swara Justisia*. 4(2): 121–138.
- Saragih, R. A., Sembiring, R., Suhaidi, S. dan Andriati, S. L. (2023). Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat:(Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan dan Desa

Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan). *Locus Journal of Academic Literature Review*. 243-260.

- Sempau, F., Adar, D. dan Mau, A. E. (2021). Analisis Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Sistem Agroforestry Di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Wana Lestari*. 3(01): 020–028.
- Septiliana, N. dan Nur, S. H. (2023). Tata Kelola Penyelesaian Konflik Agraria Hak Guna Usaha Pada Pt. Socfindo Dan Kelompok Tani:(Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batu Bara). *SAJJANA: Public Administration Review*. 1(1): 1–10.
- Setiawan, R., Febryano, I. G. dan Bintoro, A. (2018). Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Agroforestri dalam Program Kemitraan di KPH Unit XIV Gedong Wani (Participation of the Community in the Development of Agroforestry in the Partnership Program in the Gedong Wani Forest Management Unit). *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 56–63.
- Silooy, H. G., Tjoa, M. dan Iskar, I. (2024). Modal sosial dalam pengelolaan hutan adat Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon. *Tropical Small Island Agriculture Management*. 4(1): 1–8.
- Subagyo, R. A. (2021). Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. *Paradigma*. 10(1)
- Suparyana, P. K., Yakin, A., Amiruddin, H. S. D., dan Sukardi, L. (2022). Modal sosial kemitraan kelompok petani di kawasan hutan Rarung selama pandemi covid-19. *Jurnal Hutan Tropis*. 10(1).
- Surnayanti, S., Tsani, M. K., Harianto, S. P., Santoso, T., Dewi, B. S., Wistary, M., dan Maharanti, D. (2024). Training on making compost blocks using agroforestry waste for the Pujo Makmur forest farmers group. Pesawaran Regency, Lampung. *Community Empowerment*. 9(4): 618–624.
- Suyadi, S., MR, D. E. (2020). Peran Kepemimpinan Tokoh Informal Terhadap Kemandirian Kelompok Tani Hutan. *Jurnal Kommunity Online*. 1(2).

- Syafitri, S. M., Setiawan, B., dan Ningsih, R. V. (2024). Modal sosial dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan Lembah Sempager di Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*. 5(3): 470–477.
- Syahrin, S., Umanailo, M. C. B., Halim, H., dan Alias, A. (2023). Kearifan Lokal Mecula Haroano Laa dan Mewuhia Limano Bhisia sebagai Perwujudan Kohesi Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 12(3): 487–497.
- Syalihin, M., Kamarubayana, L. dan Yahya, Z. (2025). Studi tentang hutan kemasyarakatan di uptd KPHP Delta Mahakam di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika*. 3(1): 103–118.
- Syamsuri, M., Trison, S. dan Kurnia, T. D. (2025). Resolusi Konflik Pengelolaan Hutan Dalam Gabungan Kelompok Tani Batawawi di Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomassa. *PIPER*. 21(2):129–141.
- Syarif, A. S. dan Halida, R. (2025). Aksi Kolektif Pada Gerakan Sosial: Sebuah Perspektif Psikologi. *Psyche: Jurnal Psikologi*. 7(1): 1-27.
- Toha, M., Wihadanto, A., dan Nurhasanah, N. (2023). Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di Kota Tarakan. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*. 7(2): 133.
- Tsani, M. K., Rachmah, W. A., Harianto, S. P., dan Asmarahman, C. (2025). Keanekaragaman Jenis Vegetasi pada Pola Penanaman Agroforestri Kapulaga dan Non-Kapulaga di Gapoktanhut Pujo Makmur KPH Pesawaran. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*. 20(2): 170–182.
- Uphoff, N. (1999). *Understanding social capital: learning from the analysis and experience of participation*. In: *Social capital: a multifaceted perspective (Dasgupta P, Serageldin I, eds)*. The World Bank, Washington D.C. 215-249.
- Usman, S. E., Hapsari, V. R., SE, M., dan Silvester, M. P. (2024). *Buku ajar modal sosial*. Mega Press Nusantara.

- Utami, V. Y. (2020). Dinamika Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial Dan Norma. *Reformasi*. 10(1): 34–44.
- Wandira, Y. A., Kaskoyo, H., Febryano, I. G., dan Yuwono, S. B. (2020). Implementasi kemitraan kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Way Terusan. *Jurnal Hutan Tropis*. 8(3): 244–250.
- Woolcock, M. (1998). Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework. *Theory and Society*. 27: 151–208.
- Wulandari, C., Kurniasari, N., Bakri, S., Dewi, B. S. dan Safe'i, R. (2024). Perception of Forest Farmer Groups as a Mediating Variable in Achieving Goals as Members of the Forestry Partnership. *Jurnal Sylva Lestari*. 12(2): 401-417.
- Yani, A., Iswandi, R. M., dan Syaf, H. (2017). Implementasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan Ambololi di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan). *Jurnal Perencanaan Wilayah*. 2(2): 1–10.
- Yudischa, R., Wulandari, C., dan Hilmanto, R. (2014). Dampak partisipasi wanita dan faktor demografi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (hkm) terhadap pendapatan keluarga di Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari*. 2(3): 59–72.
- Yulastina, R., Puspaningrum, I. I., Suharyanto, D. F. dan Kurdi (2025). Communication for Farmer Empowerment in Social Capital Perspective (Study on Kalianget Salt Farmer Group in Sumenep Regency). *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*. 3(8): 5719–5730.
- Yusriadi, Y. (2025). Sustaining food security through social capital in agroforestry: a qualitative study from North Luwu, Indonesia. *Frontiers in Sustainable Food Systems*. 9, 1580017.
- Zhang, Y. dan Chen, L. (2025). Managing social capital networks in digital international innovation ecosystems. *Journal of Knowledge Management*. 29(3): 512–530.

Zulkarnain, A. A. (2021). Strategi kebijakan percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau. *Journal of Governance Innovation*. 3(2): 172–188.

Zuraidah, A., Sardjono, M. A., dan Rujehan, R. (2022). Modal sosial dalam mendukung program perhutanan sosial (kasus di HTR Kecamatan Batu Ampar, Kutai Timur). *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*. 6(2): 135–148.